

**PENGARUH KARAKTERISTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)  
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)  
DI INDONESIA  
(Studi Empiris Pada Perusahaan perbankan Yang Terdaftar di BEI  
Tahun 2008-2011)**

Dwi Arini Untoro  
Zulaikha<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

**ABSTRACT**

*This study aimed to analyze the characteristics of the GCG that affect CSR disclosure in annual reports of banking companies listed in the Indonesian Stock Exchange in the year 2008-2011. GCG characteristics used in this study is the size of the board of commissioners, the proportion of independent of commissioners, and audit committee size.*

*The population of this study are all banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 2008-2011. Total sample is 100 annual report of banking companies as determined by purposive sampling method. This research analyzes CSR disclosure in annual reports by the method of content analysis. Data analysis was performed using multiple regression analysis with SPSS for Windows 16.00.*

*The results of this study indicate that the size of the board of directors and firm size (size) significantly affect CSR disclosure in Indonesia, and the proportion of independent board of directors, audit committee size, leverage, and profitability no proven effect against broad disclosure of CSR.*

**Keywords:** *Corporate Social Responsibility (CSR), Board Of Commissioners, Independent Board Of Commissioners, And Audit Committee.*

**PENDAHULUAN**

*Corporate Social Responsibility* CSR merupakan isu yang hangat untuk dibicarakan. Hingga saat ini CSR terus berkembang, dimana pada awalnya pengungkapan CSR merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela, namun saat ini berubah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan CSR ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tidak terkecuali pemerintah. Bentuk nyata dukungan pemerintah terlihat dengan adanya undang-undang untuk mengatur pelaksanaan dan pengungkapannya.

CSR didefinisikan sebagai pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang berhubungan dengan interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Menurut Ginting (2007), CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan.

Perusahaan memiliki alasan masing-masing mengapa mereka mengungkapkan CSRnya. Menurut Nasir dan Warisi (2008), pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan. Hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan pemasaran produk, disamping untuk memperoleh kepercayaan para investor dan masyarakat. Ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial dapat menimbulkan rintangan bagi perusahaan berupa tekanan sosial dan sentimen negatif yang akan menghancurkan nama baik perusahaan dan menghambat kegiatan operasional perusahaan.

Di Indonesia, CSR sudah banyak diterapkan pada perusahaan dan diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa setiap penanam modal wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sedangkan pada Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa setiap perseroan yang

---

<sup>1</sup> Penulis penanggung jawab

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Bedasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, CSR berlaku untuk semua jenis perusahaan, terutama PT, dimana termasuk di dalamnya adalah perusahaan perbankan. Perbankan berdasarkan pada kegiatan operasionalnya memang tidak menimbulkan limbah atau dampak negatif kepada lingkungan. Namun demikian, perbankan dirasa tetap perlu untuk mengungkapkan CSR-nya karena keberadaannya di tengah masyarakat. Dalam menjaga eksistensinya, perbankan atau perusahaan secara umumnya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Djogo (2005), bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya diungkapkan oleh industri yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kepada masyarakat sekitar, namun juga bagi sektor perbankan selaku badan yang bergerak dalam bidang keuangan.

Adanya undang-undang dan peraturan tentang CSR ternyata belum dapat mengatur pelaksanaan CSR dengan baik. Pada kenyataannya pengungkapan CSR masih dianggap sepele dan dijalankan dengan setengah hati (Daniri, 2008). Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Nasir dan Warisi (2008), bahwa tidak semua perusahaan mau dan mampu untuk melaksanakan CSR karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan erat dengan moral etika bisnis. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan menumbuhkan kesadaran para pelaku bisnis bahwa CSR merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya. Oleh sebab itu, dalam pengungkapan CSR ini diperlukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), karena implementasi dari tanggung jawab perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya (Nasir dan Warisi, 2008).

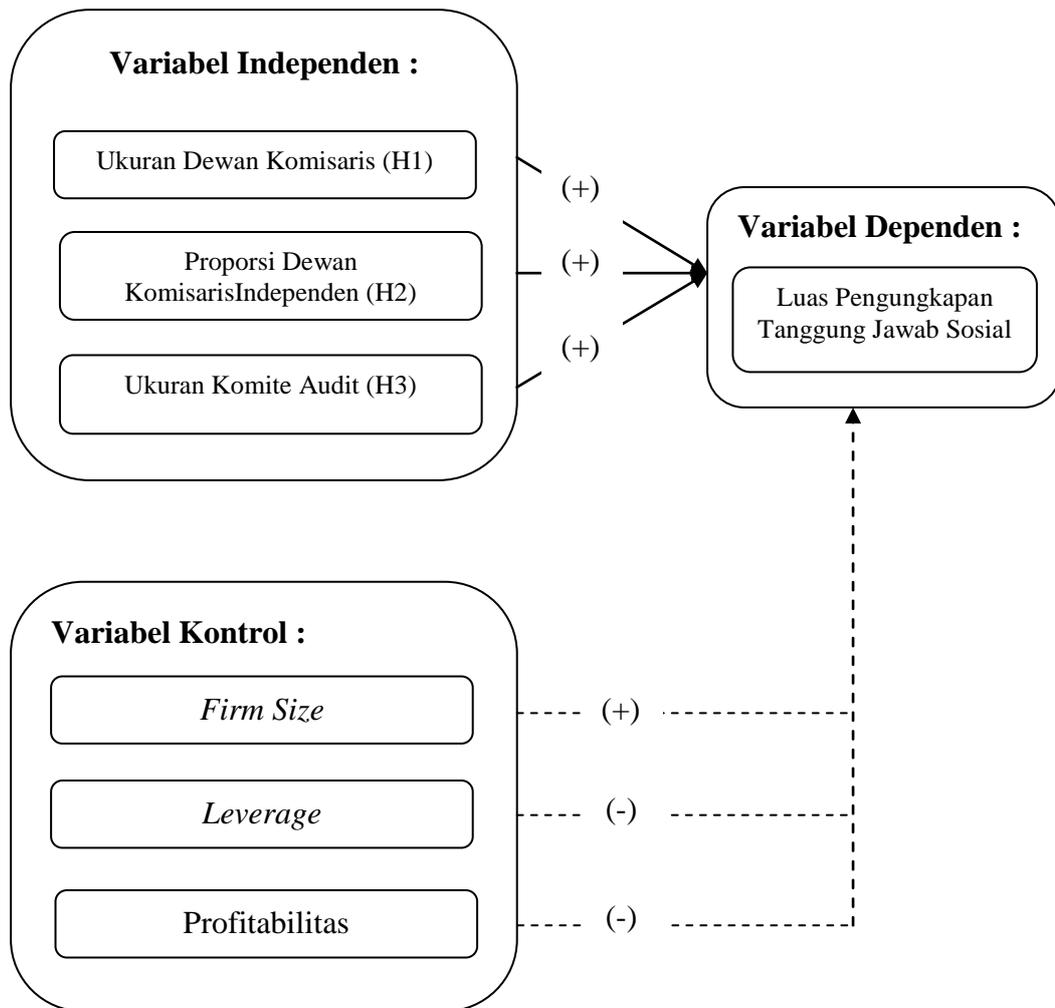
## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Praktik pengungkapan atau pelaksanaan CSR dan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat dipisahkan dari teori agensi dan legitimasi Dalam konsep GCG perspektif hubungan keagenan tidak dapat dipisahkan. Hubungan keagenan merupakan keadaan antara dua belah pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi agen dan pihak lain menjadi principal (Hendriksen dan Van Breda, 2000). Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya konflik kepentingan antara agen dan principal. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), bahwasannya konflik kepentingan disebabkan oleh adanya kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal sehingga memunculkan biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Ibrahim (2007), konflik kepentingan ini ada karena adanya perbedaan tujuan diantara berbagai pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya dalam perusahaan. Teori keagenan selain menjelaskan tentang adanya konflik kepentingan juga menjelaskan mengenai adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah keadaan dimana hanya salah satu pihak saja yang lebih banyak mengetahui informasi internal. Sebagai pengelola, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat merugikan perusahaan, oleh sebab itu maka perlu diadakan tindakan untuk menguranginya. Menurut Ibrahim (2007), tindakan yang tepat untuk mengurangi adalah dengan adanya pengawasan yang dapat menyelaraskan seluruh tindakan yang ada dalam perusahaan. Pengawasan yang dimaksud dapat dilaksanakan dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. Penerapan GCG diharapkan memberikan kepercayaan kepada manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham) dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan manajemen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan biaya keagenan.

Selanjutnya Ulman (1982) dalam Ghazali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan berada di tengah-tengah masyarakat dan atas keberadaannya tersebut maka perusahaan harus dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat dimana perusahaan

tersebut berada, sehingga terjadi hubungan yang harmonis diantara keduanya. Legitimasi dalam dunia bisnis dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang paling umum yang digunakan dalam dunia bisnis adalah dengan mengungkapkan pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR. Pengungkapan CSR ini diharapkan dapat membuat perusahaan memperoleh legitimasi sosial sehingga dapat memaksimalkan kekuatan keuangan dalam jangka panjang (Kiroyan, 2006 dalam Sayekti dan Wondabio, 2007).

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



**Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi kinerja direksi, selain itu dewan komisaris juga bertugas untuk memberikan nasehat atau petunjuk kepada direksi (Sembiring, 2005). Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005), menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, adanya monitoring akan mengakibatkan tekanan terhadap manajemen, sehingga mengungkapkan informasi, termasuk informasi tanggung jawab sosial akan semakin besar pula.

**H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR**

### **Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Peraturan Bapepam IX.I.5 mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung dengan emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. Menurut Muntoro (2006), komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham (mayoritas) dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan diatas kepentingan lainnya. Dengan demikian semakin banyak jumlah ukuran dewan komisaris independen, maka kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka melindungi pemangku kepentingan dan mengutamakan perusahaan akan semakin objektif.

#### **H2 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.**

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia, komite audit mempunyai tugas sebagai fasilitator bagi dewan komisaris. Tugas tersebut adalah untuk memastikan bahwa: (a) Struktur pengendalian internal bank telah cukup untuk menjaga agar manajemen siap menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian. (b) Pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. (c) Tindak lanjut temuan hasil audit telah dilaksanakan oleh manajemen dengan baik. Berdasarkan tugas tersebut keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi pengawasan atau monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Dengan demikian, semakin banyak ukuran komite diharapkan proses pengawasan akan dilakukan semakin baik dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin luas.

#### **H3 : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan CSR pada laporan keuangan tahunan bank yang dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index (CSRI)*. Kategori jumlah pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasar item pengungkapan CSR yang dipergunakan oleh Khan (2010) untuk industri yang bergerak di bidang keuangan sebanyak 60 item pengungkapan. Selanjutnya, variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Variabel ukuran dewan komisaris dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan (Said, *et al.* (2009)). Skala yang digunakan untuk mengukur komposisi dewan komisaris independen yaitu dengan skala rasio, yaitu persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Khan, 2010). Variabel ukuran komite audit diukur dengan jumlah total anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan profitabilitas. Variabel ukuran *size* diukur dengan menggunakan total asset (Khan, 2010). Variabel *leverage* diukur dengan total DER (total kewajiban/total ekuitas), sesuai dengan Khan (2010). Variabel profitabilitas diukur dengan ROE (laba bersih setelah pajak/total ekuitas), sesuai dengan Khan (2010).

### **Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pada perusahaan perbankan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative*

sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perusahaan yang memiliki *annual report* tahun 2008-2011 yang terdapat di bursa efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) atau dapat diakses dari *website* masing-masing perusahaan.
2. Mengungkapkan (*disclosure*) informasi tentang tanggung jawab sosial.
3. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai *corporate governance* perusahaan dan data lain yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan peneliti.

### Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariat dengan menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) sebagai berikut:

$$CSR_i = \alpha_0 + \beta_1UDK + \beta_2DKI + \beta_3KA + \beta_4Size - \beta_5Lev - \beta_6Prof + e$$

Keterangan :

- CSR<sub>i</sub> : indeks pengungkapan CSR (Dependen)  
 $\alpha_0$  : *intercept*  
 UDK : ukuran dewan komisaris  
 DKI : proporsi komisaris independen  
 KA : ukuran komite audit  
 Size : ukuran perusahaan (*kontrol*)  
 Prof : profitabilitas (*kontrol*)  
 Lev : *leverage* (*kontrol*)  
 e : *error term*

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Berdasarkan perhitungan berdasarkan metode *purposive sampling*, maka diperoleh ukuran sampel sebanyak 100 perusahaan yang dapat dilihat pada table 1 berikut ini:

**Tabel 1**  
Perusahaan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011	107
Data rusak dan tidak memenuhi kriteria (data buram, hanya laporan keuangan saja, dan tidak ada pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan)	(7)
Jumlah sampel	100

Sumber: Hasil pengolahan data 2012

### Analisis Data

Pengujian deskriptif bertujuan untuk menguji seberapa besar nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi sehingga diketahui seberapa besar keakuratan data dan penyimpangan pada data tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
Hasil Analisis Deskriptif

Variabel	Min	Max	Mean	Std. Dev.
CSR <sub>i</sub>	0	1	0,51	0,121
Uk. Dekom	2	8	4,95	1,749
Prop. Dekom. Indep (%)	40	80	57,85	7,869
Uk. Komite Audit	2	8	3,84	1,143
Size (juta rupiah)	5.628	551.891.704	75.232.955	119.138.446
Leverage (%)	-3	16	9,15	3,264
Profitabilitas (%)	-153	12	-1,31	15,366

Sumber: Hasil pengolahan data 2012

### Hasil Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis

Ringkasan hasil uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 3.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

**Uji Normalitas:** Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai  $p$  dari *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* adalah 0.942 ( $p > 0,05$ ) yang artinya distribusi data pada penelitian ini adalah normal.

**Uji Multikolinieritas:** Berdasarkan hasil Uji Multikolinieritas pada tabel 3 diketahui nilai VIF menunjukkan  $< 10$ , yang artinya masing-masing variabel bebas tidak memiliki hubungan. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa asumsi multikolinieritas terpenuhi.

**Uji Heteroskedastisitas:** Berdasarkan hasil Uji Glejser pada tabel 3, seluruh nilai signifikansi lebih dari 0,05 ( $p > 0,05$ ), maka data dinyatakan bebas homoskedastisitas.

**Uji Autokorelasi:** Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa nilai *Durbin-Watson* untuk model regresi adalah sebesar 1.936. kemudian nilai tersebut dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jumlah sampel dalam penelitian ini ( $n$ ) adalah 100, dan jumlah variabel independen 3 ( $k=3$ ), maka dari tabel *Durbin-Watson* akan didapatkan nilai  $dL$  (batas bawah) 1.613 dan  $dU$  (batas atas) 1.736. Pengambilan keputusan didasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$dU = 1.736$$

$$4-dU = 4-1.736 \\ = 2.264$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai *Durbin-Watson* dari model regresi lebih besar dari batas atas ( $dU$ ) dan kurang dari  $4-dU$  ( $1.736 < 1.936 < 2.264$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif, dengan kata lain tidak terdapat autokorelasi dalam model yang dipergunakan dalam penelitian.

**Tabel 3**  
Hasil Uji Asumsi Klasik dan Uji Regresi Berganda

Variabel	Prediksi Tanda	Nilai Koefisien	<i>t-value</i>	<i>p-value</i>	VIF	Glejser
Uk. Dekom	+	0,018	2,270	0,026	1,989	0,087
Prop. Dekom. Indep	+	-0,002	-1,629	0,107	1,365	0,303
Uk. Komite Audit	+	0,002	0,145	0,885	1,714	0,070
Size	+	$3,389 \times 10^{10}$	3,366	0,001	1,467	0,673
Leverage	-	0,008	2,654	0,009	1,017	0,137
Profitabilitas	-	0,000	-0,293	0,770	1,123	0,283
<i>D-W</i>		= 1,936				
$R^2$ (%)		= 38,2 %				
Adjusted $R^2$ (%)		= 34,2%				
<i>F Statistic</i>		= 9,588 dan $p = 0,000$				
<i>One Sample K-S Test</i>		= 0,529 dan $p = 0.942$				

Sumber: Hasil pengolahan data 2012

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan CSR

Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil uji  $t$  dengan variabel dependen luas pengungkapan CSR yang ditunjukkan dalam tabel 3 menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai  $t$  sebesar 2,270 dan nilai signifikansi sebesar 0,026. Nilai signifikansi  $0,026 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama, yaitu, "Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR" diterima.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa pada perekonomian yang modern seperti sekarang ini banyak perusahaan yang memisahkan antara pengelolaan dan kepemilikan perusahaan. Perusahaan melimpahkan atau mendelegasikan wewenang perusahaan kepada pihak yang dianggap lebih ahli dalam mengelola perusahaan.

Menurut Sutedi (2011), para tenaga professional ini bertugas untuk mengelola perusahaan, melaksanakan segala hal untuk kepentingan perusahaan dan juga memiliki keleluasaan untuk menjalankan manajemen perusahaan sehingga para professional ini disebut sebagai agen dari pemegang saham. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005), semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, kebanyakan peneliti menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh perusahaan (Sembiring, 2005).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Sulistyarini (2007) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini berarti semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka akan semakin luas pengungkapan CSR oleh perusahaan.

### **Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil uji t dengan variabel dependen luas pengungkapan CSR yang ditunjukkan dalam tabel 3 menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai t sebesar -1.629 dan nilai signifikansi sebesar 0,107. Nilai signifikansi  $0,107 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua, yaitu, "Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR" tidak dapat diterima.

Alasan yang dapat menjelaskan hasil ini adalah adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Berdasarkan peraturan tersebut, jumlah komisaris independen adalah minimal 50% dari jumlah total komisaris. Rata-rata perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki 57,58%. Jumlah komisaris independen ini kemungkinan hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan, sehingga belum mampu untuk melaksanakan pengawasan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh pendapat Muntoro (2006) bahwa kemampuan berdiskusi dan berorganisasi manusia terbatas, sehingga semakin banyak jumlah komisaris independen yang semakin besar mengakibatkan ketidakefisienan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Handajani. dkk (2009), Waryanto (2010), serta penelitian Ratnasari dan Prastiwi (2010) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

### **Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil uji t dengan variabel dependen luas pengungkapan CSR yang ditunjukkan dalam tabel 3 menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit memiliki nilai t sebesar 0,145 dan nilai signifikansi sebesar 0,885. Nilai signifikansi  $0,885 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga, yaitu, "Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR" tidak dapat diterima.

Alasan yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan hal ini adalah karena rata-rata jumlah komite audit yang telah diolah adalah 4. Hasil itu menunjukkan bahwa rata-rata ukuran komite audit seluruh perbankan yang terdaftar di IDX adalah 4. Jumlah ini kemungkinan hanya untuk memenuhi peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Bapepam Nomor IX.15 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan ini mengatur bahwa semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen dan branggotakan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pihak independen, sehingga fungsi pengawasan atau monitoring belum dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hidayah (2009) dan penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2010), yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Berdasarkan hasil uji t dengan variabel dependen luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditunjukkan dalam tabel 3 bahwa variabel ukuran perusahaan (*firm size*) memiliki nilai t sebesar 3,366 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa prediksi “Ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan” diterima.

Hubungan positif dan signifikan yang ditunjukkan antara *firm size* dan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Sembiring (2005), berdasarkan teori agensi semakin besar ukuran perusahaan maka akan timbul biaya keagenan yang semakin besar pula. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial. Selain itu, menurut Cowen et.al (1987) dalam Sembiring (2005), perusahaan yang besar akan selalu mendapat tekanan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar memiliki aktivitas operasi dan hubungan masyarakat yang lebih besar mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat oleh perusahaan, sehingga hal ini akan mengakibatkan tanggung jawab sosial akan diungkapkan secara lebih luas.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Darwis (2009), Khan (2010), dan Badjuri (2011) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan CSR.

### **Pengaruh *Leverage* Terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Berdasarkan hasil uji t dengan variabel dependen luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditunjukkan dalam tabel 3 bahwa variabel *leverage* memiliki nilai t sebesar 2,654 dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Nilai signifikansi  $0,009 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, nilai t yang positif menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam penelitian ini adalah positif, yaitu semakin besar rasio *leverage* maka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin besar pula. Dengan demikian prediksi “*Leverage* berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan” tidak dapat diterima.

Perbankan dengan rasio *leverage* yang tinggi dituntut untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas agar kinerja perusahaan terlihat bagus. Namun demikian perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi cenderung akan melaporkan laba yang lebih tinggi dengan cara mengurangi biaya-biaya yang dapat mengurangi laba. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi biaya untuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Sehingga dengan adanya rasio *leverage* yang besar maka akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan dengan nilai *leverage* yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosialnya agar tidak menjadi sorotan para *debholders*.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa tingkat *leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Haniffa and Cooke (2005), Khan (2010), dan Badjuri (2011).

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan CSR**

Berdasarkan hasil uji t dengan variabel dependen luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ditunjukkan dalam tabel 3 bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai t sebesar -0,293 dan nilai signifikansi sebesar 0,770. Nilai signifikansi  $0,770 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, besar kecilnya profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini juga menunjukkan bahwa prediksi “Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan” tidak dapat diterima.

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi dirasa tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan dan sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah perusahaan perlu mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk menunjukkan kinerja yang baik atau “good news” misalnya dalam lingkup sosial, sehingga investor akan tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR. namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sembiring (2005), Anggraini (2006), dan Badjuri (2011).

## SIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya, maka simpulan dapat diringkas sebagai berikut:

1. Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Luas Pengungkapan CSR.
2. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Luas Pengungkapan CSR.
3. Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Luas Pengungkapan CSR.
4. *Firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Luas Pengungkapan CSR.
5. *Leverage* tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Luas Pengungkapan CSR.
6. Profitabilitas tidak berpengaruh negative dan signifikan terhadap Luas Pengungkapan CSR.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Perusahaan perbankan di Indonesia jumlahnya ada banyak, namun yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) jumlahnya masih sangat sedikit (rata-rata jumlah pertahun 27-31 bank), sehingga hasil dari penelitian ini belum bisa dipergunakan untuk menggeneralisasikan keadaan perbankan secara keseluruhan.
2. Pengungkapan CSR dalam penelitian ini hanya berfokus pada pelaporan dalam *annual report* saja, sehingga pengungkapan lain yang mungkin dilaporkan melalui media lain belum dapat dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Pada penelitian selanjutnya objek penelitian tidak hanya perbankan yang terdaftar di BEI saja, namun seluruh perbankan di Indonesia, sehingga hasilnya bersifat lebih umum dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Pada penelitian selanjutnya dapat mencari informasi tentang pengungkapan CSR dari berbagai media selain *annual report*, misalnya dalam media elektronik atau media cetak sehingga informasi pengungkapan ini dapat lebih akurat.

## REFERENSI

- Anggraini, Fr. Reni. Retno. 2006. *Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Padang 23-26 Agustus.
- Arun, T.G., and J. D. Turner. *Corporate Governance of Banks in Developing Economies: Concepts and Issues*. Corporate Governance : An International review, Vol. 12 No. 3.
- Aryani, Dwinita. 2012. *Kajian Kinerja Keuangan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan*.

- Badjuri, Achmad. 2011. *Faktor-faktor Fundamental , Mekanisme Corporate Governance, pengungkapan Corporate Social responsibility (CSR) Perusahaan Manufaktur Sumber Daya Alam Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3 No. 1
- Chairi, Zulfi. 2005. *Tanggung Jawab Direksi dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance*. e-USU Repository. Universitas Sumatra Utara.
- Darwis, Herman. 2007. *Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Financial Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial perusahaan High Profile di BEI*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 13, No.1. Hal 52-61.
- Forum Corporate Governance Indonesia (FGCI). 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Jakarta
- Ghazali, Imam. 2006. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : badan Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ghazali, Imam dan Anis Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Jamin. 2007. *Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)*. Lex Jurnalica Vol. 5 No. 1.
- Hackston, David and Milne, Marcus J. 1996. *Some Determinants of Social and Environmental Disclosure In New Zealand Companies*. Accounting, Auditing, and Accountability Journal Vol . 9 No. 1.
- Handajani, Lilik, Sutrisno, dan grahita Chandrarin. 2009. *The Effects Of Earning Management and Corporate Social responsibility Disclosure: An Empirical Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange*. The Indonesian Journal of Accounting Research, Vol 12, No. 3. Page 233-248.
- Haniffa, R.M., dan Cooke, T.E. 2002. *Culture, Corporate Governance and disclosure in Malaysian Corporation*. Abacus, Vol. 38, No.3.
- Hendriksen, Eldon S., dan Michael F. Van Breda. 2000. *Teori Akunting terjemahan dari Accounting Theory*. Interaksara : Jakarta.
- Hidayah, Chusnul. 2009. *Pengaruh mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial: Studi empiris pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di BEI*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Diponegoro
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 1996. *Manajemen Strategis terjemahan dari Strategic Management 5<sup>th</sup> Edition*. Yogyakarta : Andi.
- Jensen, Michael C., dan Meckling William H. 1997. *Theory of the firm : Managerial Behaviour, Agency Cost, Ownership and Stucture*. Journal of Financial Economics 3.
- Khan, Md. Habib Uz-Zaman. 2010. *The Effect of Coorporate Governance Elements on Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting (Empirical Evidance from Private Commercial Banks of Bangladesh)*. International Journal of Law And Management. Vo;l. 52, No. 2.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan indonesia*. Jakarta.
- Mulili, Benjamin Mwanzia, and Dr. Peter Wong. 2010. *Corporate Governance Practices in Developing Countries : The Case for Kenya*. International Journal of Business Administration. Vol. 2, No. 1.
- Muntoro, Ronny Kusuma. 2006. *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. Universitas Indonesia.
- Nasir, Mohammad dan Darwin Warisi. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance dalam Mewujudkan Corporate Social Responsibility*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan Vol.1 No. 2.
- Neu, D., H. Warsame and K. Pedwell: 1998. *Managing Public Impressions: Environmental Disclosures in Annual Reports*. Accounting, Organizations and Society, 23(3), 265-282.
- O'Donovan, G.2000. *Legitimacy Theory as an Explanation for Corporate Environmental Disclosures*, Victoria University of Technology, Melbourne, Australia.
- Ratnasari, Yunita, dan Andri Prastiwi. 2010. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro
- Riyanto, Bambang. 2008. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Jogjakarta:BPFE



- Said, Roshima., Yusserie Hj. Zainuddin, dan Hasnah Haron. 2009. *The Relationship between Corporate Governance Charavteristics in Malaysian Public Listed Companies*. Social Responsibility Journal. Vol 5, No. 2.
- Sayekti dan Wondabio, 2007. *Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earning Response Coefficient*. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar.
- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo , 15-16 September
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility:From Charity to Sustainability*. Jakarta. Salemba Empat
- Sudana, I Made dan Putu Ayu Arlindania W. 2011. *Coorporate Governance dan Pengungkapan Coorporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Indonesia*. Jurnal Manajemen teori dan trepan Tahun 4 No. 1
- Surya, Indra., dan Ivan Yustivananda. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance* . FHUI. Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waryanto. 2010. *Pengaruh Karakteristik good Corporate Governance (CGC) Tergadap Luas Pengungkapan Coorporate Social Responsibility (CSR) di indonesia*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Universitas Diponegoro.
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- <http://www.reindo.co.id/reinfokus/edisi24/peranan.htm> diakses pada 28 April 2012 pukul 11.06 WIB
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Profitabilitas> diakses pada 24 Mei 2012 pukul 7:55 WIB
- <http://csr.bankmandiri.co.id/arsip-pers-12-2011.html> diakses 12 Juli 2012 pukul 8.47 WIB
- [http://www.mutiarabank.co.id/view/iframe/csr\\_news.php?kat=csr\\_news](http://www.mutiarabank.co.id/view/iframe/csr_news.php?kat=csr_news) diakses 12 Juli 2012 pukul 8.47 WIB